

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah kemiskinan, sedangkan mayoritas penduduk negara Indonesia terletak pada taraf ekonomi yang rendah. Permasalahan ini juga berpengaruh terhadap kondisi suatu negara sehingga negara Indonesia mengalami permasalahan-permasalahan yang mendasar dan menyangkut pemenuhan kebutuhan ataupun akses terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi.<sup>1</sup> Sementara itu Sumarnonugroho menegaskan bahwa kemiskinan itu sendiri memiliki makna yang relatif. Kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berupa orang yang secara ekonomi miskin (merujuk pada seorang anggota atau sekelompok orang yang telah mengalami kondisi kehidupan tertentu sehingga tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara layak), tetapi kemiskinan emosional dalam arti khusus; diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kondisi hidup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan psikososial.<sup>2</sup>

Penanganan kemiskinan juga sangat diperlukan untuk membuat suatu program yang bisa memberdayakan masyarakat kurang mampu. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dari pemerintah. PKH telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun

---

<sup>1</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan," *Journal Nonformal education and community empowerment*, Vol.1, (2) (Desember, 2017), hal. 161.

<sup>2</sup> T. Sumarnonugroho, "*Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*," (Yogyakarta: Pt hanindita, 1984).

2007 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan menteri sosialnya ialah Jufri Assegaf guna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan perlindungan sosial, sedangkan Desa Jengkol sudah memulai Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019. Beberapa negara telah melaksanakan Program Keluarga Harapan dan cukup efektif dan dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat.<sup>3</sup>

Menurut Rahayu “Program Keluarga Harapan (PKH) ialah suatu program pemberian uang tunai kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang sudah sesuai dengan persyaratan serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan sudah melaksanakan kewajibannya”. Menurut data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai target peserta, PKH ini juga difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya yang tersedia bagi masyarakat miskin dengan memberdayakan ibu-ibu, dengan tujuan mendorong anak-anak mereka untuk tetap bertahan hidup dan sekolah.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan PKH, terdapat kedudukan Dinas Sosial yang sudah menjadi kedudukan utama dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan. Dinas Sosial merupakan suatu unit pemerintahan di bidang sosial yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan mengurus suatu kegiatan profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok masyarakat guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang sosial agar mampu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik lagi.

Kedudukan Dinas Sosial pula tidak jauh berbeda dengan pekerjaan sosial yang lain, ialah menolong orang dalam meningkatkan serta

---

<sup>3</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, “Peran Pendamping dalam Pembe rdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan”, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume 1(2), (Desember 2017), Hal.161- 169.

<sup>4</sup> Rahayu.S.L, “*Bantuan Sosial Di Indonesia*”, ( Bandung :Fokus media, 2012), Hal. 128.

menggunakan keahlian mereka secara efektif dengan tujuan menolong mereka menuntaskan tugas setiap hari serta menuntaskan permasalahan sosial yang mereka hadapi. PKH adalah program pemerintah yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung. PKH juga merupakan program pemerintah yang masih perlu direncanakan, ditata, dan dievaluasi sebelum dapat dilaksanakan. Dalam program PKH ini, selain manajemen yang efektif peran Dinas Sosial harus diamati secara serius karena peran Dinas Sosial memungkinkan kita untuk menentukan seberapa besar capaian program.<sup>5</sup>

Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yang memiliki komponen seperti ibu hamil, ibu yang mempunyai balita, keluarga yang mempunyai anak di jenjang SD, SMP dan SMA atau anak 7 sampai 12 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penyandang disabilitas berat serta lansia diatas 70 tahun. Kemiskinan di Desa Jengkol bukan persoalan baru lagi, masalah ini sudah menjadi masalah yang tentu sudah sering diperbincangkan oleh negara lain begitu pun pemerintah daerah. Nilai kemiskinan di Desa Jengkol memang tidak begitu jauh berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun diakibatkan oleh bermacam kendala, di sinilah peran Dinas Sosial untuk membahas permasalahan tentang kemiskinan tersebut.

Hal ini didukung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang bahwa ada beberapa kendala dalam Program Keluarga Harapan ini di antaranya masalah data penerima manfaat yaitu seperti nomor NIK (Nomor Induk

---

<sup>5</sup> Mohd Iqbal Abdul Muin dan Siti Abidah Lubis, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* VoL. 8 No.1 Tahun 2020, hal. 93-94.

Kependudukan) salah dan ganda, tidak ada saldo yang merata, serta ada beberapa kartu keluarga yang tidak cair dananya. Untuk pencairan bantuan PKH ini satu tahun empat kali jadi, per tiga bulan sekali ialah setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.<sup>6</sup>

Melihat sedang tingginya angka kemiskinan di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, tentunya diperlukan suatu peran dari lembaga pemerintah khususnya Lembaga Dinas Sosial. Agar mampu berusaha dan menekankan nilai kemiskinan melalui beberapa bagian program pemberdayaan masyarakat. Kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam menawarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti komitmen organisasi terhadap tujuan mencapai kesejahteraan sosial untuk semua. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sesuai dengan visi tersebut.

Maka dari itu, guna mencari informasi yang akurat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menyejahterakan Masyarakat di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, terdapat perumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana perlindungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang?

---

<sup>6</sup> Wawancara Nurul Ripsi Fatimah selaku pendamping PKH pada 24 juni 2022.

2. Apa peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Keluarga Harapan di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mengacu pada apa yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan dari penulis skripsi ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran Dinas Sosial terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu dapat mengetahui terkait nilai-nilai kesejahteraan masyarakat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sendiri.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengetahuan dalam memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

*Pertama*, skripsi yang ditulis Moh Fathur Rohman, yang berjudul “Peran Pendamping Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Triwidadi Pajangan Bantul” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Dari hasil penelitian ini ada beberapa tujuan di antaranya untuk menentukan hasil dari proses pendampingan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini. Tesis ini mengupas tentang analisis dan gambaran upaya program Keluarga Harapan dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi di Kelurahan Triwidadi Pajangan Bantul, serta upaya fasilitator program, Keluarga Harapan, dalam menjamin keberhasilan program. Fasilitator dan masyarakat setempat membentuk jaringan kerja untuk komunitasnya sendiri dan melakukan analisis. Potensi untuk mendorong kewirausahaan pada peserta program Keluarga Harapan melalui daerah ini.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian Moh. Fathur Rohman dengan yang akan dibahas adalah mengenai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran

---

<sup>7</sup> Moh Fathur Rohman, “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan,” (Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

*Kedua*, skripsi yang ditulis Andre Kusumawardani yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” di Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021. Dari hasil penelitian ini banyak ditemukan faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan di antaranya ialah ketidakpuasan masyarakat karena informasi yang tidak lengkap dan pendataan yang tidak akurat. Serta penyaluran bantuan yang sering terlambat dan keterlambatan penerimaan dana oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Andre Kusumawardani dengan skripsi yang akan dibahas yaitu mengenai faktor penghambat yang ada di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang ialah pencairan dana tidak merata serta nomor NIK masyarakat yang menerima dana tidak sesuai dengan data di Duscakpil.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Evi Rahmawati yang berjudul “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah” di Universitas Semarang, 2017. Dari hasil penelitian ini tentang pentingnya keaktifan seorang pendamping PKH dalam memberdayakan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Andre Kusumawardani, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa,” (Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar,2021). Hal.83.

Penelitian ini dilakukan dengan sama-sama berfokus pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Evi Rahmawati dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini lebih berfokus kepada peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Peran**

Penafsiran peran menurut Robbins yang dikutip oleh Dadang, peran merupakan kepribadian yang dapat berhubungan dengan tanggung jawab seseorang dalam suatu unit sosial dan kedudukan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas atau wewenang yang diamanatkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan di mana seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai jabatannya. Perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status tertentu oleh orang lain adalah definisi lain dari suatu peran. Individu mengambil peran yang sesuai yang dianalisis sebagai bagian dari proses sosialisasi.<sup>11</sup>

Kemudian menurut Habibullah dalam Evi Rahmawati, peran pendamping PKH dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah karena kedudukannya sebagai mitra masyarakat. Berdasarkan konsep penggiat masyarakat, peran

---

<sup>9</sup> Evi Rahmawati, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah," (Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2017). Hal.168-169.

<sup>10</sup> Syafaruddin, "Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer," (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hal.59.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi: Suatu Pengantar," (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 212.

pendamping PKH adalah pendampingan. Kedudukan yang terkait dengan dukungan masyarakat, kesempatan, dan motivasi. Pendamping PKH di sisi lain, ada juga sebagai kedudukan dalam keterampilan mendidik. Pendamping juga mempunyai kedudukan aktif sebagai agen yang memberikan masukan yang positif dan terarah. Tanggung jawab pendamping meliputi membangkitkan kesadaran masyarakat, menyebarluaskan informasi, dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat.<sup>12</sup>

Teori peran menurut Jim Ife ialah terbagi kedalam empat kategori, yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis.<sup>13</sup>

a. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif adalah peran yang berupaya mendukung, memperkuat, mengakui, dan menghargai upaya yang dilakukan oleh orang, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. menjalin kesepakatan dengan pihak lain, khususnya pihak-pihak yang bekerja sama untuk memaksimalkan potensi setiap individu, setiap kelompok, dan setiap komunitas. Jim Ife menyatakan bahwa peran fasilitatif memiliki tujuh peran berbeda.<sup>14</sup>, yaitu:

---

<sup>12</sup> Habibullah, "Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang," *Jurnal Informasi* (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial), Vol.16 (2) Tahun 2011

<sup>13</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).h. 558.

<sup>14</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi community development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.558.

1) Animasi sosial

Peran animasi sosial dapat dilakukan dengan menginspirasi, mengaktifkan, memberdayakan, dan memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan.<sup>15</sup>

2) Mediasi dan negoisasi

Konflik kepentingan atau nilai merupakan permasalahan umum yang harus ditangani oleh program pengembangan masyarakat. Di saat itulah tugas mediator sangat berguna untuk menyelesaikan konflik.<sup>16</sup>

3) Pendukung

Masyarakat sering kali kurang percaya diri untuk memanfaatkan bakat mereka secara maksimal, sehingga bantuan dari agen perubahan sangatlah penting.<sup>17</sup>

4) Pembangun konsesus

Membangun konsensus merupakan perpanjangan dari fungsi mediasi. Tujuannya adalah untuk menjembatani perbedaan masyarakat.<sup>18</sup>

5) Fasilitator kelompok

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, diperlukan seorang fasilitator agar setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.558.

<sup>16</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.563.

<sup>17</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.566.

<sup>18</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.567.

<sup>19</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.570.

## 6) Pemanfaatan sumber daya

Pelaku perubahan harus mampu mengenali dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan keterampilan yang tersedia di masyarakat.<sup>20</sup>

## 7) Mengorganisasi

Kapasitas seseorang dalam berorganisasi mencakup kapasitasnya untuk mempertimbangkan apa yang diperlukan, apa yang dapat dilakukan sendiri, dan tugas apa yang harus diprioritaskan.<sup>21</sup>

## b. Peran edukasi

Dinas Sosial berperan dalam menetapkan agenda, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu, kelompok, dan masyarakat di samping membantu proses peningkatan produktivitas. Peran pendidikan ini dapat dipenuhi dengan meningkatkan kesadaran, menyebarkan informasi, dan mengadakan sesi pelatihan bagi individu, kelompok, dan komunitas.

## 1) Peningkatan kesadaran masyarakat

Langkah pertama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adalah menghubungkan masyarakat dengan struktur makrososial dan politik yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan dari sudut pandang individu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.575.

<sup>21</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.577.

<sup>22</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development....*, h.583.

## 2) Memberikan informasi

Memberikan informasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, aktor perubahan pun demikian harus memberikan informasi yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Informasi yang disampaikan hendaknya merupakan informasi yang ada relevan dan berguna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

## 3) Mengkonfrontasi

Teknik konfrontasi digunakan jika tidak ada solusi lainnya. Teknik konfrontasi ini harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menggunakannya karena terkadang teknik ini dapat merusak hubungan antara pelaku perubahan dan masyarakat sasaran.<sup>24</sup>

## 4) Pelatihan

Pelatihan ialah peran pendidikan yang paling spesifik karena pada dasarnya berfokus pada upaya mendidik masyarakat bagaimana melakukan sesuatu. Dalam hal ini bukan pelaku perubahan selalu bertindak sebagai orang yang memberikan pelatihan. Namun aktor perubahan bertindak lebih sebagai penghubung untuk mencari tahu permasalahannya personil yang kompeten untuk melaksanakan pelatihan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.587.

<sup>24</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.587.

<sup>25</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development* ....., h.590.

c. Peran representasi

Dinas Sosial bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang melayani kepentingan orang, kelompok, dan masyarakat. Peran tersebut dilakukan antara lain dengan memperoleh sumber dari luar dengan pertimbangan yang matang, seperti pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donor dan bantuan modal usaha. Melakukan advokasi hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat dengan mendukung upaya implementasi program dan berupaya mewujudkan program tersebut. menggunakan media untuk mengumumkan hasil produksinya.

Selain itu juga berupaya memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam jaringan kerja yang lebih besar dan terbuka dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dan kelompok serta berupaya membujuk mereka untuk terlibat dalam upaya-upaya pembangunan potensial tersebut, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat umum, dan Dinas Sosial, yang berbagi keahlian dengan pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

1) Mendapatkan sumber

Sumber yang disebutkan bisa berupa keuangan, energi, lapangan kerja, lembaga terkait, atau lainnya. Untuk mencapai kesejahteraan sosial, sumber dari luar dapat mendukung sistem sumber dari dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.591.

<sup>27</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development....*, h.592.

## 2) Advokasi

Pada hakikatnya, kepentingan masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan dapat dipertahankan sehingga hak-hak masyarakat dapat diwujudkan dengan mengadvokasi kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

## 3) Memanfaatkan media massa

Media massa dapat mendukung hasil yang diinginkan dengan sangat efektif. Penggunaan media massa dapat melibatkan penyebaran berita atau memasang iklan di media cetak, televisi, atau internet.<sup>29</sup>

## 4) Hubungan masyarakat

Berpartisipasi dalam pertemuan dengan LSM, pemerintah, kelompok masyarakat lainnya, atau membagikan brosur dan materi lainnya merupakan kegiatan yang terkait dengan posisi ini.<sup>30</sup>

## 5) Jaringan kerja

Membangun jaringan yang produktif berarti membangun koneksi dengan berbagai pihak dan berupaya membujuk mereka untuk mengambil bagian dalam proses pemberdayaan.<sup>31</sup>

## 6) Berbagi pengetahuan dan pengalaman

Dalam kapasitas ini, harus didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat tidak dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki

---

<sup>28</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*...., h.595.

<sup>29</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*...., h.597.

<sup>30</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*...., h.598.

<sup>31</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*...., h.600.

potensi atau pengetahuan yang dapat dipelajari, melainkan sebagai pihak yang benar-benar memiliki keduanya.<sup>32</sup>

d. Peran teknis

Pegawai di Dinas Sosial harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, menyajikan secara lisan dan tertulis, mengelola keuangan, dan mengevaluasi potensi pengembangan individu, kelompok, dan masyarakat. Dinas Sosial dapat memainkan peran ini bersama dengan masyarakat, organisasi, dan komunitas untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat digunakan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan dan membantu mempromosikan serta mengembangkan potensi. Oleh karena itu, Dinas Sosial sangat penting untuk memaksimalkan potensi masyarakat, kelompok, dan masyarakat.<sup>33</sup>

1) Pengumpulan dan analisis data

Cara lain untuk menjelaskannya adalah para ilmuwan sosial berkontribusi dengan menggunakan berbagai metodologi yang berguna. Penelitian sosial bertujuan untuk memahami dengan cepat kebutuhan dan bidang permasalahan masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development....*, h.602.

<sup>33</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 604-614.

<sup>34</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community development....*, h.604.

## 2) Menggunakan komputer

Kemampuan menggunakan komputer sangat penting untuk banyak tugas, termasuk menyimpan data, menganalisis data, membuat proposal dan laporan, dan banyak lagi.<sup>35</sup>

Peran juga dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang telah ada dalam skenario dan telah diatur oleh masyarakat, dan mengatur peran apa dan bagaimana setiap orang bermain dalam pergaulannya. Demikian pula tertulis kedudukan apa yang harus ditempati oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Teorinya adalah jika seorang pria mengikuti naskah hidupnya akan harmonis, tetapi jika dia melanggarnya, penonton akan menertawakannya dan sutradara akan menegurnya.<sup>36</sup>

Peran juga dapat diperoleh dari partisipasi, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan dan peran dicirikan oleh:

1. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan: membuat dan melaksanakan keputusan.
2. Bentuk kontribusi: seperti ide, tenaga, materi, dan lain- lain.
3. Pengaturan kerja: perlakukan satu sama lain secara setara (peran ganda).
4. Menetapkan tujuan: ditentukan oleh kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat: sebagai subjek.

Jadi bisa disimpulkan peran adalah aspek dinamis dari posisi seseorang relatif terhadap harapan orang lain yang menduduki posisi:

1. Struktur peran terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>35</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* Community development....., h.608.

<sup>36</sup> Rusmin Tumanggor, dkk., *"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,"* (Jakarta: prenadamedia Group, 2010), hal.58-59.

- a) Peran formal (peran yang jelas)  
perilaku yang homogen. Dalam keluarga, terdapat peran formal yang mapan.
- b) Peran informal (peran tertutup)  
adalah karakter pendiam atau sensitif yang biasanya menjaga keseimbangannya tanpa bersikap terbuka.<sup>37</sup>

## 2. Perlindungan sosial

### a. Pengertian perlindungan sosial

Selama ini perlindungan sosial dan jaminan sosial telah di definisikan dengan berbagai cara. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Bank Pembangunan Asia (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan berupaya meningkatkan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi diri mereka dari bencana dan hilangnya pendapatan. Perlindungan sosial tidak berarti mencakup seluruh kegiatan pembangunan di bidang sosial. Padahal perlindungan sosial tidak mencakup upaya pengurangan resiko. Dijelaskan lebih lanjut bahwa istilah “jaring pengaman sosial” dan “jaminan sosial” sering digunakan sebagai istilah alternatif untuk perlindungan sosial, namun istilah yang lebih

---

<sup>37</sup> Joesoef Soehendy, *Partisipasi Masyarakat*, (Jawa Barat: Jetis, 1990).

umum digunakan secara internasional adalah perlindungan sosial.<sup>38</sup>

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Edi Suharto, dalam bukunya Penguatan Jaminan Sosial di ASEAN, menggambarkan jaminan sosial sebagai serangkaian kebijakan dan program sosial yang bertujuan untuk mengurangi jumlah nyawa yang selalu menjadi ancaman bagi masyarakat dengan memperluas risiko pasar tenaga kerja yang efisien dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan terhadap penyakit mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Memperkuat perlindungan sosial untuk mengurangi kemampuan masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan gangguan atau hilangnya pendapatan.<sup>39</sup>

Dikatakannya, bahwa kebijakan dan program perlindungan sosial khususnya bagi negara-negara di kawasan ASEAN mencakup lima jenis, yaitu:

- a. Kebijakan pasar tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong berjalannya hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja secara efektif.

---

<sup>38</sup> Amiluddin, "*Perlindungan Sosial Anak Usia Sekolah Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*", (Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>39</sup> Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*" (Refika Aditama: Bandung, 2005).

- b. Bantuan sosial (social assistance), yaitu program jaminan sosial dalam bentuk bantuan tunai, barang, atau manfaat sosial, yang umumnya diberikan kepada kelompok umat manusia yang paling rentan tanpa penghasilan yang memadai. Langkah-langkah kebijakan pasar tenaga kerja dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong berlakunya hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja secara efektif.
- c. Asuransi sosial, yaitu sistem asuransi sosial yang diberikan kepada peserta dalam bentuk simpanan yang semata-mata didasarkan pada iurannya.
- d. Dalam jaring pengaman sosial berbasis komunitas, perlindungan sosial ini dirancang untuk mengatasi kerentanan di tingkat komunitas.
- e. Perlindungan anak.

**a. Manfaat perlindungan sosial**

Perlindungan sosial harus menjadi solusinya masyarakat yang sangat miskin menghadapi kemiskinan dan kerentanan absolut. Manfaat perlindungan sosial mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini.

- a) Melindungi masyarakat dari berbagai resiko dan menghindari penderitaan yang berkelanjutan.
- b) Meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam mengatasi dan keluar dari kemiskinan.
- c) Keluarga miskin memiliki standar hidup yang lebih baik

d) Terwujudnya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial.<sup>40</sup>

### 3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dipakai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, dan harus didukung oleh anggota atau komunitas serta masyarakat untuk membuktikan bahwa dengan adanya partisipasi dari anggota atau masyarakat secara aktif maka membantu untuk mengembangkan sebuah komunitas itu sendiri. Jadi pada intinya pemberdayaan masyarakat itu bisa terwujud jika masyarakat itu sendiri mampu berpartisipasi.<sup>41</sup>

Banyak ahli yang menyebut kata pemberdayaan. Dari akar kata ‘daya’, inilah kata dasar yang ditambahkan awalan ‘ber’. Daya berarti kekuatan atau tenaga, dengan demikian kata pemberdayaan berarti usaha yang dilakukan untuk menjadikan suatu benda menjadi kuat atau mempunyai daya atau kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. kata *empowerment* mengandung dua pengertian yaitu:

- a. *To give ability or enable to*, yang didefinisikan sebagai pemberian kemampuan atau tenaga yang cukup untuk melakukan suatu tugas.
- b. *To give power authority to*, yang berarti memberikan kekuasaan atau kewenangan.

Membebaskan seseorang dari kontrol yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk berperan dalam ide, keputusan, dan tindakan mereka’ adalah bagaimana Wasistiono mendefinisikan pemberdayaan

---

<sup>40</sup> Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, (Refika Aditama: Bandung, 2005).

<sup>41</sup> Rizal Fransisco, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi di Desa Parijatah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

dalam bukunya. Dengan kata lain, tidak hanya pihak yang melaksanakan pemberdayaan menentukan keberhasilan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pihak aktif yang diberdayakan untuk memperbaiki situasi dan kondisi.<sup>42</sup>

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan atau memulihkan daya suatu masyarakat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat manusia dengan cara yang bermartabat. Pemulihan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berbeda, bebas, dan mandiri merupakan tujuan akhir pemberdayaan masyarakat.<sup>43</sup>

a. Fungsi dan tujuan pemberdayaan masyarakat

Menurut Jim Ife dalam praktiknya, pemberdayaan memiliki fungsi dan tujuan untuk mendorong atau memotivasi, membimbing atau membantu meningkatkan kemandirian individu atau masyarakat. Pekerjaan ini merupakan tahapan dalam proses kemampuan mengubah perilaku sehingga kebiasaan lama dapat diubah menjadi perilaku baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Otorisasi juga menekankan pada proses bukan hanya output dari proses ini. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu dan masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Dedeh Maryani, dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Hal.1.

<sup>43</sup> Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.3, No.2 (Mei 2012), hal. 79.

<sup>44</sup> Jim Ife, "*Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis dan Practice*", (Australia: Longman, 1995).

b. Tahapan – Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut teori Isbandi Rukminto Adi pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Tahap persiapan yaitu persiapan petugas dan lapangan. Persiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih, sedangkan persiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap wilayah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

2) Tahap pengkajian

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dirasakan serta aset milik masyarakat yang akan diberdayakan.

3) Tahap perencanaan alternatif program

Pada titik ini, fasilitator berusaha melibatkan masyarakat secara aktif dalam memikirkan permasalahan yang mereka hadapi dan potensi solusinya. Masyarakat diharapkan mempertimbangkan berbagai alternatif program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mengatasi permasalahan terkini.

4) Tahap performulasian rencana aksi

Pada tahap ini fasilitator membantu setiap kelompok masyarakat sasaran pemberdayaan dalam mengembangkan gagasannya, terutama jika melibatkan penulisan proposal yang akan dikirimkan kepada pemberi dana.

#### 5) Tahap pelaksanaan program

Pada tahap ini, masyarakat menerapkan apa yang telah diputuskan dalam praktik. Keterlibatan masyarakat dan fasilitator sangat diperlukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Fasilitator dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik karena meskipun segala sesuatunya telah direncanakan dengan baik, hal-hal buruk masih bisa terjadi.

#### 6) Tahap evaluasi

Pada tahap ini, masyarakat dan fasilitator program yang mengawasi proses pemberdayaan dilibatkan dalam proses pengawasan. Masyarakat dan fasilitator harus dilibatkan dalam proses evaluasi.

#### 7) Tahap terminasi

Tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dikenal dengan tahap terminasi. Penghentian sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah mampu mandiri, meski dilakukan karena pemberi dana sudah berhenti memberikan bantuan.<sup>45</sup>

### c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu di antaranya:

#### 1) Strategi Tradisional

Strategi ini menunjukkan agar masyarakat mengetahui dan kebebasan untuk memilih yang terbaik dalam setiap situasi. Dengan kata lain, masing-masing pihak bebas menentukan

---

<sup>45</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 35-37.

kepentingannya sendiri, hidupnya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

2) Strategi aksi langsung

Strategi ini membutuhkan kepentingan untuk mendominasi dari sudut pandang yang dihormati dari semua pihak yang terlibat dapat berubah sewaktu- waktu. Dalam strategi ini, ada pihak yang sangat mempengaruhi keputusan.

3) Strategi informasi

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massal diperlukan dalam jangka panjang sebelum identifikasi kepentingan pribadi.<sup>46</sup>

Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan, maka kampanye pemberdayaan akan semakin berhasil. Suharto dalam Anwas menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu

- a) Pemberdayaan yang demokratis, tidak ada faktor pemaksaan.
- b) Pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi tujuan.
- c) Objek pemberdayaan adalah subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
- d) Pemberdayaan berarti merevitalisasi nilai, budaya dan kearifan masyarakat lokal.
- e) Pemberdayaan merupakan proses yang membutuhkan waktu, sehingga harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

---

<sup>46</sup> Hikmat Harry, "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*", (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hal. 45.

- f) Mentoring atau pendampingan perlu dilakukan dengan bijak dan konsisten.
- g) Pemberdayaan perlu diintegrasikan.
- h) Perempuan perlu diberdayakan, terutama remaja dan ibu muda, karena mereka memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengurangi kemiskinan.
- i) belajar terus menerus dan belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- j) Pemberdayaan memerlukan perhatian terhadap keragaman budaya.
- k) Pemberdayaan ditujukan pada partisipasi aktif individu dan masyarakat.
- l) Tujuan pemberdayaan mensyaratkan pengembangan kewirausahaan sebagai syarat kemandirian.
- m) Agen pemberdayaan harus kompeten, dinamis, fleksibel, dan dapat ditindak lanjuti.
- n) Pemberdayaan membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari departemen pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM dan perguruan tinggi.<sup>47</sup>

## 2. Kesejahteraan Sosial

Menurut Imam Al-Ghozali, konsep kesejahteraan Islam terdiri dari lima komponen utama: mempertahankan keyakinan agama seseorang, jiwa seseorang, keturunan seseorang, properti seseorang, dan pikiran seseorang. Islam dengan tegas mendesak ummatnya untuk terus berusaha mengupayakan bantuan pemerintah

---

<sup>47</sup> Oos, Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

untuk hidup mereka terutama negara-negara maju. "Negara Kesejahteraan" lebih tepat diterjemahkan dengan kesejahteraan negara karena isu yang dihadapi adalah pentingnya peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan sosial adalah keadaan kemakmuran, keselamatan, keamanan, kesusilaan, ketenangan, kemakmuran, kelahiran, dan pikiran yang memungkinkan setiap warga negara memenuhi tujuan jasmani, spiritual, dan sosial bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat lainnya.<sup>48</sup> Dengan menjunjung tinggi hak, martabat, serta tanggung jawab hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Sementara itu, setidaknya ada empat makna yang melekat pada konsep kesejahteraan sosial ini diberikan kepada orang miskin sebagai manfaat sosial karena mayoritas dari mereka yang menerimanya adalah masyarakat miskin, menganggur, atau cacat. Karena itu, istilah "kesejahteraan" dapat dikaitkan dengan ide-ide negatif seperti kemiskinan, ketergantungan, dan kemalasan. Sebagai bantuan sosial, pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan layanan sosial pribadi adalah lima jenis utama layanan sosial yang biasanya disediakan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru.<sup>49</sup>

Selain itu, penghapusan kemiskinan dalam segala manifestasinya adalah tujuan utama kesejahteraan sosial. Konsekuensinya meskipun perluasan kesejahteraan sosial dimaksud untuk melayani khalayak yang lebih luas. Sasaran utama terutama untuk kebutuhan masyarakat luas adalah Permintaan Pelayanan

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>49</sup> Edi Suharto, *kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Kesejahteraan Sosial (PKKS), khususnya dikalangan masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin, anak-anak dan perempuan korban kekerasan, anak jalanan, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), dan kelompok rentan lainnya.<sup>50</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan atau memecahkan suatu masalah. Metode penelitian juga harus terencana, terstruktur, dan sistematis dengan tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Pada penelitian ini peneliti memakai beberapa metode:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak dimiliki lewat prosedur statistik atau dalam wujud hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif dan cenderung lebih menggunakan analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

### **2. Lokasi dan waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan ialah di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan di desa tersebut karena peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam

---

<sup>50</sup> Triono, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances," *Jurnal TAPIS* Vol.7 No.13 (Juli- Desember 2011).

pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan tersebut masih aktif hingga saat ini. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai bulan November 2023.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk menghasilkan sebuah data atau informasi yang relevan bagi penelitian.<sup>51</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber, seperti tempat, peristiwa, objek, dan rekaman.<sup>52</sup> Peneliti akan menggunakan penelitian observasi partisipatif pasif dalam penelitian ini, yaitu mengunjungi lokasi kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut serta di dalamnya.<sup>53</sup> Observasi dalam penelitian ini juga dilakukan secara langsung di Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara semistruktur yaitu proses wawancara yang memakai pedoman wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara. Adapun yang menjadi informan yaitu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Ripsi Nurul Fatimah, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang (bagian perlindungan dan

---

<sup>51</sup> Mamik, *“Metode kualitatif,”* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), Hal.76.

<sup>52</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books, 2014) hal. 162

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet ke-7, h.310.

jaminan sosial) yaitu Muhidin dan H.Syairaji, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kresek, masyarakat yang mempunyai usaha pemberdayaan yaitu Arnah dan Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu Irgi dan Suara. Peneliti memberi pertanyaan sambil memegang pedoman wawancara yang telah disiapkan. Peneliti melaksanakan wawancara melalui cara merekam dan menulis isi pembicaraan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang sudah ditulis kemudian dianalisis.

e) Dokumentasi

Peneliti mengambil foto sebagai bagian dari dokumentasi penelitiannya untuk mendukung temuannya. Arsip dan foto digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan temuan otentik yang diperoleh langsung di lapangan di lokasi penelitian. Hanya pada saat penelitian dilakukan informasi ini dapat diakses. Akibatnya, informasi hanya dikumpulkan dari sumber dan lokasi penelitian yang relevan.

Melalui observasi, observasi langsung, dan wawancara dengan sumber yang telah ditentukan, penulis penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian secara langsung berupa foto, dokumen, dan bahan lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang data primernya tidak mencukupi. Data

sekunder ini diperlukan karena adanya kekurangan tersebut. Buku, artikel ilmiah, internet, dan sumber lain semuanya akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai data sekunder.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data terjadi selama pengumpulan data dan setelah selesai dalam jangka waktu yang ditentukan dalam penelitian kualitatif. Model Miles dan Huberman yang berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, digunakan peneliti untuk menganalisis data pada saat pengumpulannya di lapangan.<sup>54</sup> Proses analisis data mencakup:

### a. Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, tahap pengumpulan data merupakan tahap yang sangat memastikan bagaimana metode serta hasil penelitian yang hendak dilakukan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

### b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola serta temanya. Dengan demikian informasi yang telah direduksi hendak membagikan cerminan yang lebih jelas serta mempermudah peneliti guna melaksanakan pengumpulan informasi berikutnya dan mencarinya bila dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data-data yang sudah

---

<sup>54</sup> Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D,*" (Bandung: Alfabeta, 2016), cet.ke-23, Hal.246.

dikumpulkan dari objek penelitian, pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah melakukan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Selanjutnya yang sering dipakai untuk menyajikan data dalam metode kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti serta data-data yang kuat untuk mendukung setiap proses dalam akumulasi data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang disampaikan pada proses awal sudah didukung oleh data, maka kesimpulan yang disampaikan ialah kesimpulan yang kredibel.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 BAB. Di mana masing-masing terdiri dari beberapa BAB dan Sub BAB yang saling bersangkutan, yaitu:

BAB I, Berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II, Menjelaskan tentang profil Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Sejarah Dinas Sosial, Visi- Misi dan tujuan Dinas Sosial,

Kegiatan Dinas Sosial, gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari Sejarah Desa Jengkol, Kondisi Umum Masyarakat.

BAB III, Menjelaskan tentang Proses Perlindungan Sosial pada Kegiatan Program Keluarga Harapan, Dampak Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB IV, Menjabarkan tentang Peran Dinas Sosial dalam Program Keluarga Harapan, Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan., Manfaat Program Keluarga Harapan.

BAB V, Penutup. pada bab terakhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi masukan untuk pihak Dinas Sosial, masyarakat, dan penulis.